

ANTARA BALI

Membangun Karakter Masyarakat Berbasis Informasi Akurat



BADUNG EDUCATION FAIR TINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN MASYARAKAT



GUBERNUR BALI TAWARKAN WISATA GRATIS DI TURYPADA TOWER | Hal. 2

PEMKAB BULELENG
LATIH GURU TANGANI
ANAK BERKEBUTUHAN
KHUSUS

Hal. 12



HAL
8

Gubernur Bali Tawarkan Wisata Gratis di Turyapada Tower

Penjabat (Pj) Gubernur Bali Sang Made Mahendra menawarkan masyarakat dapat berwisata gratis di menara pemancar siaran di Desa Pegayaman, Kabupaten Buleleng, yaitu Turyapada Tower.

Sang Made Mahendra dalam keterangan yang diterima di Denpasar, Minggu, mengatakan menara pemancar yang dibangun sejak era Gubernur Wayan Koster itu sudah rampung tahap satunya, dengan beberapa daya tarik wisata mendukung sebagai destinasi baru.

"Nantinya masyarakat bisa mendaftar secara gratis melalui website untuk berkunjung, kami akan membatasi kuota, misalnya 25 hingga 50 pengunjung per hari, sampai menara ini benar-benar operasional," kata dia lagi.

Saat ini tahap pertama sudah rampung 100 persen, dan tahap kedua akan segera menyusul dengan tambahan fasilitas yang akan disiapkan.

Salah satu atraksi wisata yang

sedang dipersiapkan adalah skywalk yang memungkinkan pengunjung berdiri di ketinggian tanpa pembatas.

"Pengunjung akan merasakan sensasi luar biasa saat berada di atas, pemandangannya indah, dan adrenalin pasti meningkat," ujarnya pula.

Menara pemancar dengan ketinggian 1.636 meter di atas permukaan laut itu, selain untuk memancarkan siaran TV digital, telekomunikasi seluler, dan internet, juga berisi planetarium, skywalk, restoran putar 360 derajat, panoramik, dan jembatan kaca di badan menara.

Pj Gubernur Bali ingin agar proyek strategis ini mampu mengatasi blank spot di Buleleng dan sekitarnya, sekaligus men-



Pj Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya saat memantau langsung proyek menara pemancar Turyapada Tower, Denpasar, Minggu (13/10/2024). ANTARA/HO-Pemprov Bali

dorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Hingga saat ini sudah dilakukan uji coba siaran salah satu stasiun televisi swasta pemegang MUX di Bali.

"Semoga dalam waktu dekat masalah blank spot yang selama ini terjadi di Singaraja dapat teratasi dengan hadirnya Turyapada Tower, dan nantinya juga menjangkau daerah-daerah lain yang belum terakses siaran di

Bali," kata dia.

Mengenai rencana peluncuran tahap satu, Mahendra Jaya mengatakan hal itu akan dilakukan setelah layanan siaran benar-benar aktif dari Turyapada Tower.

"Saat ini masih dalam tahap uji coba, kami harapkan dalam waktu dekat ketika semuanya siap, siaran dari menara ini bisa dirilis dan kita mulai soft launching," ujarnya pula. **(ant)**

Satgas Netralitas ASN di Bali Mulai Sidak ke Karangasem



Satgas Netralitas ASN Bali saat sidak di Kabupaten Karangasem, Denpasar, Rabu (9/10/2024). ANTARA/Ho-Pemprov Bali

SATUAN Tugas (Satgas) Netralitas aparatur sipil negara (ASN) Bali mulai melakukan sidak dengan lokasi yang dituju yaitu SMKN 1 Manggis, SMA Amlapura, dan UPTD PPRD Kabupaten Karangasem.

"Kita jangan meboya (berbuat yang tidak-tidak, Red) sudah ada

beberapa laporan yang masuk terkait pelanggaran netralitas dan sudah ditindaklanjuti," kata Wakil Ketua Satgas Netralitas ASN Bali I Nyoman Gde Suarditha dalam keterangan yang diterima di Denpasar, Rabu.

"Jangan sampai bapak/ibu melakukan pelanggaran, mari ber-

sama-sama kita jaga netralitas kita sebagai abdi negara dan berkomitmen untuk berpegang teguh pada pakta integritas yang telah kita tanda tangani," sambungnya.

Diketahui seluruh ASN dan Non ASN di lingkup Pemprov Bali telah menandatangani pakta integritas dan pengucapan ikrar netralitas.

Untuk menagih janji ini, satgas kemudian melakukan sidak, pembinaan, dan sosialisasi salah satunya di Kabupaten Karangasem guna mengingatkan bahwa ASN memiliki asas netralitas yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN.

Suarditha mengingatkan ASN dilarang menjadi anggota atau pengurus partai politik, dilarang berpihak kepada segala bentuk pengaruh, dan tidak memihak kepada kepentingan siapa pun.

"Kami ingin memastikan bahwa bapak/ibu semua netral

dan melaksanakan apa yang sudah ditanda tangani dalam pakta integritas, silahkan gunakan hak politik di bilik suara saja, jangan mempengaruhi ataupun secara terbuka menyatakan dukungan terhadap salah satu calon," ujarnya.

Adapun tugas Satgas Netralitas ASN Bali adalah pencegahan, penindakan, dan pengawasan, dengan jenis pelanggaran meliputi aksi pemberian dukungan kepada paslon, menjadi anggota atau pengurus partai politik, mengadakan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan, hingga ikut sebagai peserta kampanye.

Untuk jenis pelanggaran netralitas berupa kode etik mencakup membuat postingan dukungan kepada paslon, memberi tanda suka, komentar, atau membagikan terkait paslon tertentu, memasang spanduk, hingga menghadiri deklarasi paslon. **(ant)**

Pemkot Denpasar Bantu Sanur Village Festival 2024

Dinas Pariwisata (Dispar) Denpasar memberi dukungan penuh hingga bantuan pendukung gelaran Sanur Village Festival (SVF) Ke-17, sebab Kawasan Sanur sendiri merupakan penyumbang 45 persen Pendapatan Asli Daerah (PAD) Denpasar.

Kepala Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata Dispar Denpasar Ketut Trisna Aryani mengatakan penyumbang PAD yang tinggi di ibu kota Provinsi Bali ini adalah pariwisata yaitu dari pajak hotel dan restoran (PHR), dimana kontribusi Sanur untuk PHR saja mencapai 70 persen.

"Kalau kita bicara Denpasar, PAD itu tidak bisa lepas dari pariwisata, berpusat di Sanur selain beberapa daerah lain ada, makanya kami bantu kegiatan-kegiatan yang akan meningkatkan pariwisata ini," kata dia di Denpasar, Senin.

Ketut Trisna menyebut untuk Sanur Village Festival 2024 Pemkot Denpasar menggelontorkan dana bantuan sekitar Rp187



juta, dengan harapan akan ada perputaran ekonomi secara langsung di dalam acara maupun luar acara. "Tahun lalu pengunjungnya mencapai 53 ribu dalam 5 hari, sekarang seperti Sandhy Sondoro satu orang bawa 18 kru, apalagi yang band," ujarnya.

"Untuk SVF sendiri pasti kami harapkan kunjungan wisatawan yang menginap di Sanur, dan mereka pasti mengajak keluarga, apalagi Bali, itu yang kami harapkan, selain itu juga mereka berbelanja," sambung pejabat Dispar Denpasar itu.

SVF 2024 sendiri berlangsung di Pantai Mertasari, Denpasar, pada 16-20 Oktober, dengan kegiatan utama festival musik diikuti kegiatan kreatif komunitas dan



Dispar Denpasar dan Yayasan Pembangunan Sanur dalam konferensi pers jelang festival musik Sanur Village Festival 2024 di Denpasar, Senin (14/10/2024). ANTARA/Ni Putu Putri Muliartari (Ni Putu Putri Muliartari)

aksi sosial.

Ketua Yayasan Pembangunan Sanur (YPS) sekaligus Ketua Panitia SVF 2024 Ida Bagus Gede Sidharta Putra mengatakan umumnya dampak dari festival musik ini tidak terlihat langsung melainkan terasa di kenaikan okupansi kamar hotel.

Tahun sebelumnya perputaran uang dalam Sanur Village Festival

mencapai Rp10 milyar, sehingga diharapkan kesuksesan ini kembali berlanjut setelah mendatangkan Andra N The Back Bone, Dul Jaelani, Sandhy Sondoro, dan sejumlah musisi lainnya.

Melihat tren yang digemari wisatawan, Gus De, sapaannya, memfokuskan acara tahun ini kepada ruang bagi UMKM, seniman, dan komunitas. (ant)

Pjs Wali Kota Denpasar Minta Transparansi DPRD 2024-2029



Pjs Walikota Denpasar I Dewa Gede Mahendra Putra saat pelantikan pimpinan DPRD Denpasar di Denpasar, Senin (7/10/2024). ANTARA/Ni Putu Putri Muliartari (Ni Putu Putri Muliartari)

PENJABAT Sementara (Pjs) Wali Kota Denpasar I Dewa Gede Mahendra mengingatkan pentingnya transparansi selama masa jabatan saat pelantikan pimpinan

DPRD Denpasar periode 2024-2029.

"Saya ingin mengingatkan pentingnya transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi publik

dalam setiap proses pengambilan keputusan," kata dia di Denpasar, Senin.

Menurut Walikota Denpasar, dengan mengutamakan transparansi dalam memimpin maka kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif akan menguat.

Ia menilai terpilihnya anggota dewan sesungguhnya sudah merepresentasikan demokrasi dan kepercayaan masyarakat, namun dengan didukung kepemimpinan baru yang baik akan lebih memperkuat.

"Semoga amanah ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan membawa kebaikan bagi seluruh masyarakat Denpasar, mari kita wujudkan sinergi yang positif demi kemajuan Denpasar," kata orang nomor satu di Pemkot Denpasar itu.

Ketua DPRD Denpasar I Gusti Ngurah Gede mengatakan setelah

ia dan tiga wakil ketua dilantik maka hal pertama yang dilakukan adalah pembentukan alat kelengkapan dewan lainnya.

"Fraksi sudah terbentuk, ada empat, PDIP, Gerindra Golkar, dan PSI-NasDem, komisi belum, setelah ini baru masuk alat kelengkapan dewan, badan-badan nanti, selesailah di pertengahan bulan Oktober ini," ujarnya.

Adapun jajaran pimpinan DPRD Denpasar adalah I Gusti Ngurah Gede dari PDIP selaku ketua, dan wakilnya Ida Bagus Yoga Adi Putri dari Partai Gerindra, I Wayan Mariyana Wandhira dari Partai Golkar, dan Made Oka Cahyadi Wiguna dari PSI.

Sama seperti Pemkot Denpasar, DPRD Denpasar juga berharap terjadi sinergi antarinstansi, dengan target-target penyelesaian masalah seperti sampah dan infrastruktur. (ant)

Humas Pemkot Denpasar ke Surakarta Belajar Kiat Bermitra dengan Media

PEMKOT Denpasar khususnya Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kota Denpasar bersama Forum Wartawan Denpasar mempelajari kemitraan dan tata kelola media kehumasan di Pemerintah Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah.



negara untuk terus berinovasi. "Diperlukan sebuah langkah strategis yang nyata ditengah perkembangan digitalisasi saat ini, hal ini utamanya berkaitan dengan tata kelola media kehumasan baik cetak, online dan elektronik guna meningkatkan citra positif pemerintah," ujarnya.

Kegiatan yang dipimpin Kabag Prokopim Setda Kota Denpasar Cokorda Gede Partha Sudarsana ini diterima Asisten Administrasi Umum Setda Kota Surakarta Hery Mulyono didampingi Kepala Bagian Prokopim Setda Kota Surakarta, Sulistiarini di Balai Kota Surakarta pada Kamis.

Kabag Prokopim Setda Kota Denpasar Cokorda Gede Partha Sudarsana mengatakan selama ini, berbagai pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah Kota Denpasar sangat dirasakan masyarakat.

Terlebih, pelaksanaan pelayanan publik yang semakin kompleks membuat aparat sipil

Dia menjelaskan momentum ini dimanfaatkan sebagai wahana sharing inovasi, seperti Inovasi Jam Pimpinan Silaturahmi Bareng Pers (Jampi Stres) dari Pemkot Surakarta yang sangat produktif dalam mendukung terciptanya hubungan baik antara pemerintah dan insan pers, sehingga publikasi kerja pemerintah berjalan baik, ini salah satu inovasi yang akan kita tiru di Bagian Prokopim Setda Kota Denpasar.

Asisten Administrasi Umum Setda Kota Surakarta Hery Mulyono didampingi Kepala Bagian Prokopim Setda Kota Surakarta Sulistiarini mengucapkan terimakasih atas dipilihnya Kota



Kabag Prokopim Setda Kota Denpasar Cokorda Gede Partha Sudarsana (kedua kanan) menyerahkan plakat kepada Asisten Administrasi Umum Setda Kota Surakarta, Hery Mulyono (kedua kiri) didampingi Kepala Bagian Prokopim Setda Kota Surakarta Sulistiarini (kiri) saat Pelaksanaan Pekan Informasi Peningkatan Wawasan SDM atau Fasilitasi Komunikasi Pimpinan Bagian Prokopim Kota Denpasar bersama Forum Wartawan Denpasar di Pemerintah Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, Kamis (10/10/2024). ANTARA/Nyoman Hendra Wibowo

Surakarta sebagai lokasi kegiatan Pekan Informasi Peningkatan Wawasan SDM atau Fasilitasi Komunikasi Pimpinan Pemkot Denpasar bersama Forum Wartawan Denpasar.

"Tentunya pertemuan ini merupakan momentum untuk meningkatkan kolaborasi dan saling berbagi inovasi untuk

kemajuan bersama," ujarnya.

Ia menambahkan mengucapkan terima kasih atas dipilihnya Pemkot Surakarta sebagai lokasi kunjungan, besar harapan kami beragam inovasi yang ada dapat saling bertukar dan mempelajari untuk kebaikan kedua kota, serta tentunya memberikan kemanfaatan bagi masyarakat. (ant)

Tim Gabungan di Denpasar Copot Baliho Pilkada yang Melanggar



KPU Denpasar bersama tim gabungan saat menurunkan alat peraga melanggar dari paslon peserta Pilkada Serentak 2024 di Denpasar, Senin (14/10/2024). ANTARA/Ni Putu Putri Muliantari

TIM gabungan yang terdiri dari KPU Denpasar, Bawaslu Denpasar, Satpol PP Denpasar, Polresta Denpasar, DLHK Denpasar, dan Kesbangpol Denpasar menurunkan alat peraga sosialisasi maupun alat peraga kampanye Pilkada Serentak 2024 yang melanggar.

Ketua KPU Denpasar Dewa Ayu Sekar Anggaraeni di Denpasar, Senin, mengatakan sesuai PKPU Nomor 13 Tahun 2024 Pasal 39 semestinya yang menurunkan alat peraga yang tidak sesuai aturan adalah peserta pilkada, namun tim gabungan beriktikad baik mengin-

gat masih banyak alat peraga yang terpasang.

"Demi menjaga estetika dan keindahan Denpasar, kami menertibkan alat peraga sosialisasi, kemudian nantinya ada ruang untuk kami memasang alat peraga kampanye resmi yang kami fasilitasi dan tambahan 200 persen pasangan calon," kata dia.

Dalam penertiban ini, KPU Denpasar membagi tim menjadi empat regu yang tersebar di empat kecamatan. Sekar mengatakan dari 496 titik yang diatur sudah ada penurunan yang dilakukan secara swadaya oleh tim pasangan calon peserta Pilkada Denpasar maupun Pilkada Bali, namun masih banyak yang belum tersentuh.

Nantinya, setelah tim gabungan menurunkan alat peraga melanggar, alat peraga seperti baliho atau spanduk itu akan dibawa ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK Denpasar) untuk selanjutnya dapat diambil kembali oleh tim pasangan calon dan dimanfaatkan dengan tidak melanggar aturan.

Anggota Bawaslu Denpasar Dewa Ayu Agung Manik Oktariani menambahkan dalam kegiatan penurunan alat peraga bersama tim gabungan ini tugas mereka memberi rekomendasi.

Setelah itu Satpol PP Denpasar yang akan bertindak menurunkan alat peraga sosialisasi maupun alat peraga kampanye yang di luar ketentuan termasuk ketentuan pemasangan.

"Pemasangan alat peraga itu harus bisa mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota dan kawasan setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tadi ada yang menempelnya tidak sesuai aturan, sehingga sama semua tidak ada perbedaan," ujarnya. (ant)

Pemkab Badung Minta Seluruh Pihak Berkomitmen Jalankan Pilkada Damai

Pemerintah Kabupaten Badung, Bali meminta seluruh pihak untuk menguatkan komitmen bersama dalam menjaga situasi yang damai dalam rangkaian tahapan Pilkada serentak 2024.

“Kami berkomitmen dan menjaga integritas bersama seluruh masyarakat dengan hak politiknya dalam mewujudkan Pilkada di Badung dengan damai, nyaman, aman, tenang dan senang,” ujar Plt. Bupati Badung I Ketut Suiasa saat kegiatan deklarasi damai Pilkada Badung di Mangupura, Jumat.

Ia mengatakan deklarasi damai yang diinisiasi Polres Badung itu merupakan wujud upaya bersama dalam mempertahankan komitmen bersama didasari integritas yang disampaikan kepada seluruh masyarakat.

Oleh karena itu, ia meminta setelah penandatanganan deklarasi damai tersebut perlu dilanjutkan dengan wujud nyata menjaga dan mengawal komitmen yang didasari integritas.

“Kelanjutan dari komitmen kita yang terpenting dapat diwujudkan dalam aspek moral dan mental dalam menjaga suasana yang kondusif,” kata dia.

Ketut Suiasa menjelaskan masyarakat Badung sudah beberapa kali mengikuti kegiatan Pilkada seperti tahun ini, menurut dia hal itu membuat masyarakat sudah semakin dewasa dan matang dalam berdemokrasi.

“Untuk itu mari wujudkan Pilkada yang damai dengan semangat reformasi tanpa melanggar dan mengingkari semangat politik, semangat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan semangat reformasi,” kata dia.

Pada kesempatan tersebut Deklarasi Damai ditandatangani oleh Ketua DPRD Badung I Gusti



Plt. Bupati Badung Ketut Suiasa saat menghadiri deklarasi damai dan doa bersama dalam rangka Pilkada Badung tahun 2024 di Aula Polres Badung, Mengwi, Jumat (27/9/2024). ANTARA/HO-Humas Pemkab Badung

Anom Gumanti, KPU dan Bawaslu Badung, Kapolres Badung AKBP Teguh Priyo Wasono beserta Forkopimda Badung.

Selain itu, dihadiri oleh pasangan calon Bupati/Wakil Bupati Badung nomor urut 1 Bupati Badung I Wayan Suyasa-Putu Alit Yandinata beserta pasangan calon nomor urut 2 I Wayan

Adi Arnawa-Bagus Alit Sucipta didampingi tim pemenangan yang juga turut menandatangani deklarasi.

Deklarasi damai berisi enam poin antara lain mewujudkan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Badung tahun 2024 berlangsung secara umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. (adv)

Plt Bupati Badung Konsolidasi Dengan Organisasi Perangkat Daerah



Plt. Bupati Badung I Ketut Suiasa memberikan pengarahan kepada seluruh Kepala OPD di lingkungan Pemkab Badung, di Ruang Kriya Gosana, Puspem Badung, Jumat, (27/9/2024). ANTARA/HO-Humas Pemkab Badung

PELAKSANA Tugas Bupati Badung, Bali I Ketut Suiasa mengawali masa tugasnya dengan memberikan pengarahan kepada seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) untuk menguatkan konsolidasi internal di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung.

“Pelaksanaan konsolidasi

ini sangat penting sehingga program Pemerintah Kabupaten Badung ini progresif, tidak ada satu kendala dan tidak ada hambatan kedepannya,” ujar Ketut Suiasa di Mangupura, Kabupaten Badung, Jumat.

Ketut Suiasa merupakan Wakil Bupati Badung yang menjabat sebagai Plt Bupati Badung

karena Bupati I Nyoman Giri Prasta sedang berada pada masa cuti selama masa kampanye dalam pencalonannya sebagai Calon Wakil Gubernur Bali pada Pilkada 2024.

Plt Bupati Badung Ketut Suiasa mengatakan dirinya melakukan konsolidasi internal karena saat ini ia mengemban peran berbeda dalam pemerintahan di Kabupaten Badung.

Menurut dia, sebelumnya ia menjadi pembantu Bupati Badung dalam tugas-tugas tertentu, namun sekarang selama dua bulan ke depan menjadi Plt Bupati yang dalam hal tertentu dirinya harus mengambil keputusan.

“Oleh karena itu, konsolidasi ini dilakukan agar tidak berat juga saya mengambil keputusan, dan nantinya tidak terjadi miskomunikasi dengan jajaran OPD khususnya dalam hal persepsi, pengertian,” kata dia.

Ia menjelaskan sebagai Plt Bupati Badung, dirinya berkomitmen agar rencana-rencana dari Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta dalam masa pemerintahan sampai dengan akhir tahun 2024 dapat berjalan dengan lancar dan mencapai target yang telah ditentukan.

“Apalagi ini adalah tahun terakhir dalam kepemimpinan kami sebagai Bupati dan Wakil Bupati Badung. Program yang ada di tahun 2024 ini mudah-mudahan bisa terlaksana dan tidak menjadi hutang program di tahun 2025,” kata Ketut Suiasa.

Ia juga mengajak seluruh OPD untuk harus ada pada posisi yang baik dan posisi yang selalu semakin terdepan, serta semakin cepat dalam menjalankan program yang telah dirancang sekaligus dalam memberikan layanan kepada masyarakat. (adv)

Pemkab Badung Raih Penghargaan Layanan Investasi Terbaik Tahun 2024

PEMERINTAH Kabupaten Badung, Bali berhasil meraih Anugerah Layanan Investasi (ALI) tahun 2024 dari Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia.

"Penghargaan ini diraih tidak terlepas dari upaya kami melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) yang dinilai berhasil dalam kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha," ujar Plt. Bupati Badung I Ketut Suiasa dalam keterangannya di Mangu-pura, Senin.

Pada Anugerah Layanan Investasi tahun ini, Pemkab Badung meraih dua penghargaan sekaligus yakni sebagai nominasi Kabupaten Terbaik dalam Anugerah Layanan Investasi dan sebagai Kabupaten Terbaik Dalam Penilaian Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Kinerja

Pelayanan Berusaha Kabupaten se-Indonesia.

Ketut Suiasa mengatakan prestasi itu diraih ini berkat kerja keras seluruh jajaran DPMPTSP serta dukungan masyarakat Badung yang diharapkan dapat dipertahankan.

"Kami juga harus memberikan apresiasi dan penghargaan terhadap jajaran DPMPTSP Badung dan Mal Pelayanan Publik Badung yang telah mampu menghasilkan kinerja yang baik," kata dia.

Ia mengungkapkan prestasi itu juga diharapkan dapat menjadi pemantik kepada jajarannya agar selalu memberikan layanan terbaik bagi masyarakat dan memungkinkan para investor dapat berinvestasi di Badung.

Menurut dia, apabila upaya itu dilakukan maka investasi di Badung menjadi meningkat dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi, penurunan kemiskinan dan angka pengangguran



Plt. Bupati Badung I Ketut Suiasa menerima penghargaan Anugerah Layanan Investasi Terbaik Tahun 2024 yang diserahkan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. ANTARA/HO-Humas Pemkab Badung

dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

"Ini juga akan menjadikan Kabupaten Badung sebagai kabupaten yang mandiri, positif dan layak sebagai tempat investasi," ungkap Ketut Suiasa.

Kepala DPMPTSP Badung I Made Agus Aryawan menjelaskan

anugerah tersebut merupakan ajang mengevaluasi pemerintah daerah dalam penyelenggaraan kemudahan berusaha.

Pihaknya bersyukur karena Kabupaten Badung masuk peringkat terbaik pertama kategori nasional khususnya untuk kategori Kabupaten. (adv)

Pemkab Badung Tumbuhkan Tekad Kewirausahaan Generasi Muda



Penjabat Sekda Badung IB. Surya Suamba membuka acara Talk Show Investasi dan Kewirausahaan bagi Anak Muda di Kabupaten Badung di Mangupura, Selasa (1/10/2024). ANTARA/HO-Humas Pemkab Badung

PEMERINTAH Kabupaten Badung, Bali berupaya menumbuhkan semangat kewirausahaan kepada para generasi muda salah satunya dengan mendukung kegiatan-kegiatan diskusi terkait investasi dan kewirausahaan.

"Kami bersama-sama berke-wajiban untuk menyiapkan agar

generasi muda tidak hanya menjadi pencari kerja, namun memiliki keinginan dan kemampuan untuk menciptakan peluang usaha sebagai wirausaha muda yang mandiri," ujar Pj. Sekretaris Daerah Badung IB. Surya Suamba saat kegiatan diskusi yang diselenggarakan Kamar Dagang dan Industri (KADIN)

Badung di Mangupura, Selasa.

Ia mengatakan pihaknya berharap kegiatan diskusi tersebut dapat menjadi kesempatan bagi generasi muda untuk membentuk dirinya menjadi insan-insan yang tangguh dan cermat dalam melihat peluang-peluang pasar.

Menurut dia berbagai informasi baru dan diskusi yang dilakukan dalam kegiatan itu maka diharapkan dapat mendorong generasi muda setempat untuk merubah dan memperbaharui pola pikir dan bisa menjadi pengusaha yang unggul dan tangguh guna membangun perekonomian.

"Dengan mengundang para pembicara yang berkompeten dan mumpuni di bidangnya, saya kegiatan ini akan benar-benar bisa menumbuhkan jiwa kewirausahaan di kalangan generasi muda di Badung," kata dia.

Ketua KADIN Badung Putu Gede Putra Adnyana menambahkan kemudahan regulasi yang dibuat oleh pemerintah dan

terus berkembangnya teknologi telah menyebabkan banyaknya kesempatan dan kemudahan masyarakat untuk berinvestasi di pasar modal Indonesia.

Untuk itu, pihaknya ingin memberikan motivasi dan menambah wawasan generasi muda di Badung tentang investasi yang aman dan bagaimana langkah-langkah awal untuk memulai suatu bisnis yang baik dan benar.

"Dalam menyongsong masa depan Indonesia dan menuju Indonesia Emas di tahun 2045, kami ikut mendorong masyarakat serta anak muda agar ikut serta berkontribusi terhadap perekonomian Indonesia agar dapat bersaing dan berhasil mewujudkan mimpi Indonesia menjadi negara maju," kata dia.

Penjabat Sekda Badung IB. Surya Suamba membuka acara Talk Show Investasi dan Kewirausahaan bagi Anak Muda di Kabupaten Badung di Mangupura, Selasa (1/10/2024). (adv)

Pemkab Badung Tingkatkan Komitmen Budaya Integritas

PEMERINTAH Kabupaten (Pemkab) Badung, Bali, melaksanakan penandatanganan dan deklarasi komitmen bersama penanganan benturan kepentingan sebagai upaya untuk memperkuat budaya integritas sekaligus memenuhi indikator kabupaten/kota antikorupsi tahun 2024.

“Deklarasi penanganan konflik kepentingan ini akan melengkapi upaya yang telah dilakukan dalam menjaga, mengawal, memperkuat serta memperteguh komitmen budaya integritas melalui pencegahan korupsi dan gratifikasi yang telah dilakukan sebelumnya,” ujar Plt. Bupati Badung I Ketut Suiasa di Mangupura, Rabu.

Ia mengatakan selain melalui deklarasi itu, pihaknya juga mengapresiasi langkah Inspektorat Badung dalam membangun budaya integritas melalui metode pendekatan lingkungan.

Upaya itu, kata dia, dilakukan dengan membangun integritas dari keluarga, tempat kerja dan

lingkungan masyarakat, termasuk pula pendekatan sektor seni budaya, olahraga dan sektor lainnya.

“Upaya membangun budaya integritas dari semua sektor sudah kami lakukan, baik pendekatan untuk mencegah korupsi, gratifikasi maupun penanganan benturan kepentingan, tetapi muaranya kembali ke integritas personal,” kata dia.

Ketut Suiasa menjelaskan upaya dan tindakan yang dinilai paling ampuh dalam mencegah konflik kepentingan itu adalah dengan introspeksi dan koreksi diri.

Menurut dia, dalam konteks tersebut tindakan yang perlu dilakukan adalah dengan bercermin pada diri sendiri terhadap tiga hal, yaitu tanyakan diri tentang etika, integritas dan tentang nilai.

“Kegiatan deklarasi ini baru wujud komitmen gramatikal dan verbal, yang dibuktikan dengan penandatanganan dan pengucapan komitmen. Namun yang terpenting



Plt. Bupati Badung I Ketut Suiasa (kedua kiri) melakukan penandatanganan dan deklarasi komitmen bersama penanganan benturan kepentingan di lingkungan Pemkab Badung, di Ruang Kertha Gosana, Puspem Badung, Rabu (2/10/2024). ANTARA/HO-Humas Pemkab Badung

adalah deklarasi aktual dengan pelaksanaan dan tindakan,” kata dia.

Inspektur Badung Luh Suryaniti menambahkan terpilihnya Badung sebagai salah satu percontohan Kabupaten/Kota antikorupsi dari empat kabupaten/kota seluruh Indonesia tahun 2024 merupakan dasar

dari dilaksanakannya deklarasi tersebut.

Melalui kegiatan itu, menurut dia, pihaknya berupaya memenuhi indikator kabupaten antikorupsi tahun 2024 dan menginventarisasi nilai-nilai integritas khususnya terkait benturan kepentingan di lingkungan Pemkab Badung. (adv)

Pemkab Badung Evaluasi Capaian Penerimaan Pendapatan Asli Daerah



Plt. Bupati Badung I Ketut Suiasa didampingi Pj. Sekda Badung IB. Surya Suamba melaksanakan Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pendapatan Asli Daerah bersama pimpinan Napenda Badung di Puspem Badung, Kamis (3/10). ANTARA/HO-Humas Badung

PEMERINTAH Kabupaten Badung, Bali melakukan evaluasi capaian pendapatan asli daerah sampai dengan semester II Tahun 2024 sekaligus menyiapkan pembahasan Induk APBD Tahun Anggaran 2025 bersama dengan jajaran Badan Pendapatan Daerah setempat.

“Evaluasi ini menjadi langkah-

langkah yang efektif dan konkret bagi level pimpinan dalam mengambil dan menentukan kebijakan di Pemerintah Kabupaten Badung serta sebagai upaya optimalisasi dan merumuskan penetapan target Induk APBD Tahun Anggaran 2025,” ujar Plt. Bupati Badung I Ketut Suiasa di Mangupura, Jumat.

Ia mengatakan evaluasi dan koordinasi itu dinilai penting karena penentuan target capaian PAD merupakan target yang didasari kondisi faktual dan pertimbangan optimis yang proporsional.

“Sehingga kami jajaran pengambil kebijakan tidak memasang target di luar dari kondisi faktual tersebut dan juga asumsi-asumsi yang objektif sehingga nanti tidak menjadi beban bagi Bapenda itu sendiri,” kata dia.

Ketut Suiasa mengungkapkan pihaknya juga mengidentifikasi permasalahan dan kendala yang dihadapi dengan memberikan ruang untuk mendengarkan secara real yang menjadi kendala dan hambatan dalam pelaksanaan tugas baik secara internal maupun eksternal.

“Ini juga menjadi satu hal yang penting adalah mendengarkan apa yang menjadi kendala dan hambatan mereka yang perlu kita

mitigasi bersama dalam menghadapi kendala tersebut,” ungkap dia.

Untuk itu, ia juga memberikan motivasi kepada jajaran di Bapenda untuk meningkatkan sinergitas bersama melakukan gerakan ke masyarakat melalui wajib pajak sebagai upaya ekstensifikasi meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya.

Selain itu menurut dia, seluruh pihak terkait juga harus melakukan gerakan bersama-sama dan membangun sinergitas dengan masyarakat melalui wajib pajak yang dilakukan secara sistematis untuk meningkatkan produktivitas daerah.

“Hal ini juga merupakan salah satu kunci penentu bisa atau tidaknya keberhasilan visi-misi dari perencanaan kebijakan membangun Badung,” ungkap Ketut Suiasa. (adv)

Badung Education Fair Tingkatkan Mutu Pendidikan Masyarakat

BADUNG Education Fair 2024 yang diprakarsai Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Badung, Bali mengangkat tema “Wawasan Kebangsaan” sebagai upaya dalam meningkatkan mutu pendidikan.

“Kami mengapresiasi kegiatan ini sebagai bentuk kerja sama dan partisipasi antar-pemangku kepentingan untuk meningkatkan pengetahuan dari anak didik terutama untuk mengingat bagaimana perkembangan pendidikan,” ujar Pj. Sekretaris Daerah Badung IB. Surya Suamba di Mangupura, Selasa.

Kegiatan tersebut diselenggarakan dengan tujuan utama untuk mempertemukan seluruh pemangku kepentingan pendidikan baik dari pihak sekolah, pemerintah maupun mitra pembangunan.

Surya Suamba mengatakan adanya kegiatan saling berbagi informasi pada kegiatan ini diharapkan dapat mendorong peserta didik untuk mendapatkan informasi-informasi terkait pendidikan yang akan memajukan

dunia pendidikan di wilayah itu.

“Saya berharap dengan kemajuan pendidikan, kedepannya generasi-generasi muda kamu dapat membangun Kabupaten Badung menuju Badung yang bahagia,” kata dia.

Ia menambahkan kegiatan itu juga akan memiliki suatu kesan tersendiri bagi siswa khususnya melalui program yang memberikan pengalaman belajar di luar sekolah bagi para pelajar.

Selain memajukan pendidikan secara formal, ia juga meminta seluruh guru agar dapat mendidik para siswa dengan baik karena mereka adalah calon-calon pemimpin di masa depan dengan tetap mengedepankan pendidikan budi pekerti.

“Budi pekerti adalah salah satu hal yang utama dalam mendidik anak-anak kita sesuai dengan integritas. Integritas menjadi hal yang utama dalam pembangunan dan untuk menjalankan kesejahteraan masyarakat,” kata Surya Suamba.



Pj. Sekda Badung IB. Surya Suamba (kiri) mengamati hasil karya pelajar yang dipamerkan dalam kegiatan Badung Education Fair di Gedung Balai Budaya Giri Nata Mandala, Puspem Badung, Selasa (8/10/2024). ANTARA/HO-Humas Pemkab Badung

Kadisdikpora Badung I Gusti Made Dwipayana menambahkan rangkaian kegiatan Badung Education Fair telah dimulai pada Agustus lalu dengan agenda Road To BEF, lomba-lomba jenjang PAUD, SD, SMP, SMA/SMK, serta program Drop and Share yang diikuti oleh lebih dari 600 satuan pendidikan

baik formal dan non-formal.

“Pihak yang terlibat dalam kegiatan ini diantaranya adalah sekolah jenjang PAUD, SD, SMP, SMA/SMK dan SLB serta 15 mitra pembangunan yang terdiri dari lembaga swasta, organisasi masyarakat, dan lembaga donor,” kata dia. (adv)

Pemkab Badung Usulkan Pendapatan Daerah 2025 Sebesar Rp10,4 T



Plt. Bupati Badung I Ketut Suiasa saat menghadiri Rapat Paripurna Penjelasan Raperda APBD 2025, di Ruang Utama Gosana, Kantor DPRD Badung, Rabu (9/10/2024). ANTARA/HO-Humas Pemkab Badung

PEMERINTAH Kabupaten (Pemkab) Badung, Bali menyampaikan penjelasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD tahun anggaran 2025 dengan usulan rancangan pendapatan daerah sebesar Rp10,4 triliun lebih pada tahun 2025.

“Postur rancangan APBD

Badung tahun 2025 yaitu, pendapatan daerah dirancang Rp10,4 triliun lebih, meningkat sebesar Rp897 miliar lebih atau 9,36 persen dibandingkan anggaran induk 2024 sebesar Rp9,5 triliun lebih,” ujar Plt Bupati Badung I Ketut Suiasa saat Rapat Paripurna DPRD Badung di Mangupura, Bali, Rabu.

Ia mengatakan pendapatan daerah itu terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD) dirancang sebesar Rp9,6 triliun lebih dan pendapatan transfer Rp799 miliar lebih.

Selain itu, Pemkab Badung juga mengusulkan Belanja Daerah yang dirancang sebesar Rp10,5 triliun lebih atau meningkat Rp861 miliar lebih atau 8,9 persen dari anggaran induk 2024 sebesar Rp9,6 triliun lebih.

Ketut Suiasa mengungkapkan Belanja daerah terdiri dari, belanja operasi dirancang Rp5,5 triliun lebih, belanja modal Rp3,1 triliun lebih, belanja tidak terduga Rp72 miliar lebih dan belanja transfer Rp1,7 triliun lebih.

“Pembiayaan terdiri dari penerimaan pembiayaan dirancang Rp115 miliar lebih yang bersumber dari sisa lebih perhitungan tahun anggaran sebelumnya dan pengeluaran pembiayaan Rp100

miliar untuk penyertaan modal pada PT Bank Pembangunan Daerah Bali,” ungkap dia.

Ia menjelaskan proses penyusunan rancangan APBD 2025 dirancang untuk menjaga stabilitas, inklusivitas serta berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan melalui pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Selain itu proyeksi belanja, pendapatan dan pembiayaan menurut dia juga perlu dirancang fleksibel, dengan menyediakan ruang fiskal untuk mengantisipasi ketidakpastian serta mendukung berkelanjutan pembangunan dalam transisi peralihan pemerintahan daerah.

“Program-program prioritas pada APBD 2025 menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat perekonomian dan mewujudkan keadilan sosial,” jelas Ketut Suiasa. (adv)

Pemkab Badung Fokus Tingkatkan Kualitas Layanan Publik

PEMERINTAH Kabupaten Badung, Bali terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas layanan publik di wilayahnya melalui berbagai program layanan dan inovasi.

“Pemkab Badung berkomitmen untuk terus mendukung dan mengimplementasikan reformasi birokrasi dengan menghadirkan pelayanan publik yang semakin inovatif, inklusif, dan berfokus pada kebutuhan masyarakat,” ujar Plt. Bupati Badung I Ketut Suiasa dalam keterangannya di Mangupura, Rabu.

Ia mengatakan Kementerian PAN-RB sebagai instansi pembina pelayanan publik juga terus mendorong instansi pemerintah melakukan perbaikan dan peningkatan pelayanan publik melalui berbagai upaya.

“Untuk itu saya juga ber-

harap instansi pemerintah agar dapat melakukan pembaruan dan menerapkan kebijakan pelayanan publik demi terwujudnya pelayanan prima,” kata dia.

Sebagai salah satu langkah strategis untuk memperkuat kualitas pelayanan publik di Kabupaten Badung, Ketut Suiasa didampingi Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Badung I Made Agus Aryawan juga telah menghadiri kegiatan Gebyar Pelayanan Prima Tahun 2024.

Kegiatan itu diselenggarakan KemenPAN-RB untuk mendorong sinergi antar instansi dan pembaharuan layanan publik agar lebih transformatif, inovatif, dan inklusif.

Kegiatan itu juga mengevaluasi kinerja pelayanan publik yang meliputi berbagai



Plt. Bupati Badung I Ketut Suiasa menghadiri Gebyar Pelayanan Prima Tahun 2024 di Jakarta Selatan. ANTARA/HO-Humas Pemkab Badung

aspek penting seperti Pelayanan Publik Inovatif, Pelayanan Ramah Kelompok Rentan, serta Program Pendampingan Terkait Mal Pelayanan Publik, MPP Digital, dan Hub Jaringan Inovasi Pelayanan Publik.

Ketut Suiasa menambahkan jajaran instansi pemerintah me-

ng harus melakukan perbaikan dan peningkatan pelayanan publik melalui berbagai upaya untuk kepentingan masyarakat.

“Perbaikan atau peningkatan ini menasar seluruh instansi pemerintah sebagai unit penyelenggara pelayanan publik,” kata dia. **(adv)**

Pemkab Badung Paparkan Capaian Indikator Kabupaten Antikorupsi



Plt. Bupati Badung I Ketut Suiasa saat memaparkan capaian pemenuhan indikator kabupaten antikorupsi di hadapan Tim Percontohan Kabupaten Antikorupsi KPK RI ANTARA/HO-Pemkab Badung

PELAKSANA Tugas Bupati Badung, Bali, I Ketut Suiasa memaparkan capaian pemenuhan indikator kabupaten antikorupsi kepada Tim Percontohan Kabupaten Antikorupsi KPK.

“KPK telah mendukung kami di Badung sebagai kabupaten antikorupsi, hal ini merupakan sebuah penghargaan dan tan-

tangan kedepannya dalam upaya pencegahan korupsi di Badung,” ujar Ketut Suiasa di Mangupura, Kamis.

Ia menjelaskan ada enam indikator yang telah dilaksanakan di Badung berkaitan dengan penilaian percontohan kabupaten antikorupsi.

Indikator itu diantaranya

adalah tata kelola pemerintahan, peningkatan kualitas pengawasan, peningkatan kualitas pelayanan publik, peningkatan budaya kerja antikorupsi, peningkatan peran serta masyarakat dan kearifan lokal.

Terkait tata kelola pemerintahan, menurut Ketut Suiasa capaian monitoring center for prevention (MCP) Kabupaten Badung yang merupakan tolak ukur pencegahan korupsi terus meningkat dan tahun ini nilai MCP Badung berada di tujuh besar nasional.

“Kepatuhan LHKPN di Kabupaten Badung juga sudah 100 persen, hal ini merupakan bukti komitmen wujudkan transparansi penyelenggaraan pemerintahan,” jelas dia.

Ketut Suiasa mengatakan dalam peningkatan kualitas pelayanan publik, telah ada sistem yang terintegrasi secara daring. Salah satunya sistem pelayanan administrasi kependudukan daftar sendiri cetak sendiri (Aku

Dicari) dengan pengembangan sistem telunjuk sakti desa.

Selain itu, survei kepuasan masyarakat tahun 2023 indeksnya 89,52 kategori sangat baik. Sementara dalam pembangunan zona integritas, saat ini Pemkab Badung memiliki lima OPD yang meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK), yaitu RSD Mangusada, DPMPSTP, Disdukcapil, UPT Puskesmas Mengwi I dan Kecamatan Kuta Selatan.

“Secara prinsip itu yang telah kami lakukan. Kami akan terus berupaya untuk melengkapi segala dokumen dan secara kreatif membangun sistem inovasi-inovasi yang penting dalam upaya menekan dan mengantisipasi adanya area-area korupsi,” kata dia.

Perwakilan KPK RI Andhika Widiarto mengungkapkan pihaknya berterima kasih kepada Pemkab Badung yang telah mendukung dan melakukan pemenuhan indikator penilaian kabupaten antikorupsi. **(adv)**

Kabupaten Badung Tingkatkan Produksi Bawang Merah

PEMERINTAH Kabupaten (Pemkab) Badung, Bali, melakukan rangkaian kegiatan Gerakan Tanam Bawang Merah sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan produksi bawang merah di wilayahnya.

"Kami di Kabupaten Badung melalui Dinas Pertanian siap memberikan bantuan dari bibit, pupuk dan seluruh kebutuhan terkait dengan produksi penanaman bawang itu akan kami bantu," ujar Penjabat Sekda Badung IB Surya Suamba saat panen perdana bawang merah, di Subak Delod Sema, Mengwi, Badung, Senin.

Ia mengatakan luas tanam bawang merah di Badung sangat kecil, sedangkan kebutuhan bawang merah sangat besar. Oleh karena itu pihaknya melakukan berbagai upaya untuk mengajak masyarakat termasuk generasi muda agar mulai belajar bertani.

Menurut dia, pihaknya juga siap untuk membantu pemasaran,

seperti pada kegiatan panen perdana itu Pemkab Badung langsung menjalin sinergi dengan pihak pasar yang mengambil hasilnya.

"Inilah proses tata niaga berkenaan dengan produksi penanaman sampai penjualan itu diatur oleh pemerintah atau ia mi menyebutnya dengan manajemen farming," kata Surya Suamba.

Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Badung I Wayan Wijana menambahkan kendala budi daya bawang merah di wilayahnya salah satunya karena biaya produksi mahal dan faktor cuaca.

Hal itu yang mengakibatkan petani merasa berat dan enggan membudidayakan bawang merah. Sama seperti cabai, bawang merah ini juga tidak tahan dengan hujan.

Untuk mengatasi permasalahan itu, pada tahun 2023 lalu pihaknya mulai mencoba membuat demplot, kemudian mengembangkan kegiatan bawang merah. Awalnya, hasil produksi yang



Penjabat Sekda Badung IB Surya Suamba didampingi Kadis Pertanian Badung I Wayan Wijana melaksanakan Panen Perdana Bawang Merah, di Subak Delod Sema, Kelurahan Sading, Kecamatan Mengwi, Senin (14/10/2024). ANTARA/HO-Pemkab Badung

didapat hanya tiga ton. Selanjutnya pada tahun 2024, pihaknya terus mencoba mengembangkan budi daya itu setelah petani yakin bahwa bawang itu cocok di Badung.

"Tahun 2024, kami kerja sama dengan kubah, dengan petani,

kami kembangkan 10 hektare. Dan sekarang sudah mulai panen, dengan kondisi harga di pasar juga cukup bagus kalau di pasar sekarang sekitar Rp30 ribu per kilogram di tingkat petani sekitar Rp20 ribu hingga Rp25 ribu," ujar dia lagi. (adv)

Inspektorat Bali Lakukan "Exit Meeting" Akhir Jabatan Bupati Badung



Pj. Sekda IB. Surya Suamba saat acara Exit meeting pelaksanaan pemeriksaan akhir masa jabatan Kepala Daerah di Ruang Rapat Inspektorat Kabupaten Badung, Senin (14/10). ANTARA/HO-Pemkab Badung

INSPEKTORAT Provinsi Bali melakukan exit meeting dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan akhir masa jabatan (AMJ) kepala daerah (bupati) di Kabupaten Badung.

"Pemeriksaan akhir masa

jabatan Bupati Badung ini memiliki tujuan untuk menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintah daerah dan kepala daerah," ujar Inspektur Provinsi Bali I Wayan Sugiada di Mangupura, Senin.

Ia mengatakan pemeriksaan akhir jabatan Bupati Badung tersebut juga dilakukan untuk memperoleh keyakinan pada capaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang telah dicanangkan.

"Pemeriksaan ini bukan untuk mencari-cari kesalahan tetapi untuk mencegah agar tidak terjadi hal-hal yang menyimpang. Dari Hasil penilaian RPJMD Kabupaten Badung, dari tahun 2021-2024 mencapai nilai kerja 85,53 atau baik," kata dia.

Sementara itu, Pj. Sekda IB. Surya Suamba menjelaskan, pihaknya berterima kasih kepada Inspektorat Provinsi Bali yang telah melakukan pemeriksaan dan selama ini juga telah memberikan pembinaan kepada Kabupaten Badung dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

"Apa yang sudah disampaikan oleh Inspektorat Provinsi Bali akan segera kamu tindak lanjuti

dan bukan kamu tutupi atau disembunyikan. Ini untuk perbaikan layanan kedepannya," jelas dia.

Menurut dia, pemeriksaan yang dilakukan Inspektorat Provinsi Bali itu juga menjadikan Pemkab Badung lebih mengerti bagaimana pengelolaan tata pemerintahan.

"Jadi semua upaya ini akan mengarah kepada ketertiban sistem pemerintahan daerah," ungkap Surya Suamba.

Inspektur Pemerintah Kabupaten Badung Luh Suryaniti menambahkan proses pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Bali itu tidak jauh beda dengan prosedur yang dilaksanakan oleh pemeriksaan BPKP Provinsi Bali.

"Hasil pemeriksaannya berbentuk draft laporan hasil pemeriksaan dan sudah dibagikan kepada Irfan Ismadi perangkat daerah terkait untuk dijadikan acuan kedepannya," tambah dia. (adv)

Pemkab Badung Tingkatkan Budaya Literasi Masyarakat

PEMERINTAH Kabupaten Badung, Bali menyelenggarakan bimbingan teknis Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) dan Tingkat Kegemaran Membaca (TGM) untuk meningkatkan budaya literasi masyarakat.

“Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk membangun kesadaran akan pentingnya literasi dan kegiatan membaca masyarakat,” ujar Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Badung Ni Wayan Kristiani di Mangupura, Selasa.

Ia mengatakan kegiatan yang diikuti 80 orang berasal dari perbekel atau kepala desa dan pengelola perpustakaan se-Kabupaten Badung itu juga mewujudkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan pemanfaatan sumber bahan bacaan di sekitar masyarakat,

“Selama dua hari ini kami berupaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengembankan budaya baca sebagai

bagian dari program literasi,” kata dia.

Pelaksana Tugas Bupati Badung I Ketut Suiasa mengungkapkan pembangunan daerah tidak hanya bisa dilakukan untuk hal yang bersifat fisik melainkan juga harus diimbangi dengan pembangunan mental dan spiritual, salah satunya melalui pembekalan literasi.

“Melalui literasi itulah ilmu pengetahuan, wawasan, pengalaman, dan keterampilan akan kita dapatkan,” ujar dia.

Ia menjelaskan perpustakaan memiliki peranan penting dalam hal itu. Namun demikian, perlu ada stimulus untuk mendorong warga datang ke perpustakaan.

Menurut dia, perpustakaan bukan hanya tempat menyimpan dan menyiapkan buku melainkan juga berbasis pada inklusi sosial.

Dengan upaya yang telah dilakukan di Badung, ia optimistis budaya literasi akan bisa terus



Pelaksana Tugas Bupati Badung I Ketut Suiasa menghadiri Bimtek IPLM dan TGM Perbekel dan Tenaga Pengelola Perpustakaan Desa se-Kabupaten Badung. ANTARA/HO-Humas Pemkab Badung

ditingkatkan.

“Jadi bimbingan teknis ini saya rasa sangat strategis untuk kami bersama. Saya mengapresiasi pelaksanaan kegiatan yang sekaligus menjadi bukti penerapan prinsip percepatan oleh pemerin-

tahan desa,” kata dia.

Setelah pelaksanaan bimbingan teknis, katanya, kegiatan dilanjutkan dengan orientasi lapangan ke perpustakaan di Yogyakarta pada 23-25 Oktober mendatang. (adv)

Pemkab Badung-Pemprov Bali Sinergi Tingkatkan Penerimaan Pajak



Pj. Sekda Badung IB. Surya Suamba menandatangani perjanjian kerja sama antara Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Hotel The Meru Sanur, Sanur Kaja, Denpasar, Selasa (15/10/2024). ANTARA/HO-Humas Pemkab Badung

PJ Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Badung, Bali, Ida Bagus Surya Suamba menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan Pemerintah Provinsi Bali tentang Sinergi dalam Penerimaan Pajak Daerah.

Pajak daerah tersebut meliputi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan

Bermotor (BBNKB) dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB).

“Sirkulasi pendapatan asli daerah (PAD) akan semakin cepat karena menggunakan sebuah sistem ini, ketika ada pajak yang masuk, maka uang langsung terbagi, yakni Provinsi 36 persen dan kabupaten/kota 64 persen,” ujar Surya Suamba

di Denpasar, Selasa (15/10).

Ia mengatakan mengatakan opsen pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu pada pajak daerah tersebut dimaksudkan untuk mempercepat penerimaan bagian Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) bagi Kabupaten/Kota.

Hal itu juga dinilai akan dapat memperkuat sumber penerimaan daerah dan memperkuat sinergi pemungutan pajak antara provinsi dan kabupaten/kota.

Pada perjanjian kerja sama itu, sistem pembagian PKB, BBNKB serta Pajak MBLB dengan sistem terdahulu, dikumpulkan lebih dulu di provinsi hingga tiga bulan, dengan ketentuan baru sistem option riil, pajak yang masuk langsung ditransfer ke masing-masing kabupaten/kota.

“Sistem yang transparan ini akan menjamin terbangunnya integritas pemerintahan, baik di provinsi maupun kabupaten/

kota,” ujar Surya Suamba.

Sementara itu, Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra menjelaskan bahwa penandatanganan perjanjian kerja sama itu mengimplementasikan UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang dipertegas dengan UU Pemerintah No. 35 Tahun 2023.

Sinergi tersebut akan menentukan realisasi penerimaan atau dikenal dengan opsen, jadi pemasukan PKB dan BBNKB secara riil langsung teralokasi ke rekening daerah masing-masing kabupaten/kota.

“Hal ini belum sesuai dan optimal dibandingkan dengan potensi yang ada, artinya potensi yang belum bisa ditarik semua atau belum mencerminkan ruang realisasi dan potensi masih jauh, sehingga adanya kebijakan pemutihan yang bertujuan sebagai potensi relaksasi atau pemutihan denda pajak,” katanya. (adv)

Pemkab Buleleng Latih Guru Tangani Anak Berkebutuhan Khusus

DINAS Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Buleleng, Bali melatih guru untuk menangani anak berkebutuhan khusus sehingga tetap memberikan pendidikan inklusif kepada siswa.

“Para guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) harus memiliki karakteristik dan jenis-jenis Anak Berkebutuhan Khusus,” kata Kepala Disdikpora Buleleng Made Astika dalam acara Bimbingan Teknis (Bimtek) Identifikasi dan Penanganan Dasar Anak Berkebutuhan Khusus Bagi Guru PAUD di Buleleng, Bali, Selasa.

Menurut dia, guru PAUD memiliki peran yang sangat strategis dalam memberikan stimulasi yang optimal bagi tumbuh kembang anak, termasuk anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus.

“Kita menyadari bahwa setiap anak memiliki potensi dan karakteristik yang berbeda-beda, termasuk anak-anak yang

memiliki kebutuhan khusus. Keberadaan anak berkebutuhan khusus di lingkungan belajar kita merupakan sebuah keberagaman yang harus kita syukuri dan kita layani dengan sebaik-baiknya,” ucapnya.

Astika mengatakan Disdikpora Kabupaten Buleleng telah memberikan layanan pendidikan yang merata bagi seluruh masyarakat dengan pembentukan Unit Layanan Disabilitas (ULD) bidang pendidikan.

“Ini akan membantu masyarakat dan juga satuan pendidikan jenjang PAUD, SD dan SMP agar bisa terlayani utamanya terkait dengan pendidikan baik akses maupun penanganan lainnya, sehingga anak-anak disabilitas bisa mendapatkan hak yang setara untuk mengakses pendidikan yang bermutu,” katanya.

Pihaknya berharap para guru PAUD dapat meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam



Para guru peserta PAUD peserta Bimbingan Teknis Identifikasi dan Penanganan Dasar Anak Berkebutuhan Khusus Bagi Guru PAUD di Buleleng, Bali, Selasa (15/10/2024). ANTARA/HO-Diskominfosanti Buleleng

mengidentifikasi serta menangani anak berkebutuhan khusus dengan langkah nyata untuk mencapai tujuan tersebut.

“Kita berharap ke depannya dapat memberikan layanan pendidikan yang lebih inklusif dan berkualitas bagi semua anak, sehingga mereka dapat tumbuh dan

berkembang secara optimal sesuai dengan potensi masing-masing,” katanya.

Adapun kegiatan digelar selama dua hari, diikuti sebanyak 30 orang peserta dari unsur Guru PAUD dan Pengasuh Kelompok Bermain yang ada di Buleleng. **(ant)**

Pemkab Klungkung Gencarkan Gerakan Makan Ikan Atasi Stunting



Penjabat Bupati Klungkung I Nyoman Jendrika menghadiri acara Gemarikan bertempat di Balai Desa Nyalian Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung, Rabu (9/10/2024). ANTARA/HO-Humas Pemkab Klungkung

PEMERINTAH Kabupaten Klungkung, Bali, mengencarkan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) di daerah itu untuk meningkatkan gizi anak dan mencegah stunting.

Penjabat Bupati Klungkung I Nyoman Jendrika menyampaikan bahwa melalui Gemarikan, Pemkab Klungkung berupaya menekan

angka stunting di daerah itu.

“Melalui Gemarikan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mengonsumsi ikan karena dapat mencegah stunting dan menciptakan generasi yang lebih sehat dan cerdas di masa depan,” kata Nyoman Jendrika saat menghadiri acara Gemarikan di

Balai Desa Nyalian, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, Rabu.

Dia mengajak seluruh pihak baik pemerintah, swasta maupun masyarakat luas untuk bersama-sama mendukung Gemarikan.

“Mari kita bahu-membahu demi masa depan anak-anak kita dan Kabupaten Klungkung yang lebih baik,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Putu Sumardiana menyampaikan bahwa kegiatan Gemarikan ini dilaksanakan dalam rangka mengajak seluruh lapisan masyarakat, terutama anak-anak sebagai generasi penerus bangsa, sejak saat ini untuk gemar makan ikan mengingat ikan memiliki komposisi yang sangat baik untuk kesehatan, kecerdasan, dan pertumbuhan.

Dia mengatakan Gemarikan dilaksanakan di Balai Desa Nyalian, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung

diikuti 158 orang, yakni ibu hamil sebanyak 11 orang, ibu menyusui 6 orang, anak usia 0 sampai 59 bulan sebanyak 91 orang, dan anak-anak PAUD dan TK 50 orang.

Pj. Ketua Forum Peningkatan Konsumsi Ikan Provinsi Bali drg Ida Mahendra Jaya dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan Gemarikan merupakan gerakan memasyarakatkan makan ikan yang berupa pemberian paket ikan kepada ibu hamil, ibu menyusui dan anak usia 0 sampai 59 bulan.

Dia menjelaskan Gemarikan merupakan program pemerintah yang sangat penting dan strategis untuk mengakselerasikan peningkatan konsumsi ikan dalam rangka pencegahan stunting dan gizi buruk.

“Semoga melalui Gemarikan ini, tingkat konsumsi ikan di Desa Nyalian dan seluruh desa di Kabupaten Klungkung dapat meningkat,” katanya. **(ant)**